

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. *Agency Theory*

Menurut Jensen dan Meckling (1997; dalam Ujiyanto dan Pramuka, 2007), *Agency theory* (teori keagenan) merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan yakni antara *principal* (pemilik) dan *agent* (agen) sebagai pelaku utama. Pemilik merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama pemilik, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi mandat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan.

*Agency theory* memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri (*self-interest*) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. *Agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya dan para pemegang saham khususnya (Solihin, 2009: 119).

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan

dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency cost* yang mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham; biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham karena adanya pemberian opsi dan berbagai manfaat yang diberikan kepada manajemen oleh pemegang saham dengan tujuan menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan manajemen (Solihin, 2009: 119).

### 2.1.2. *Stakeholder Theory*

*Stakeholder Theory* merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para *stakeholder*. Menurut teori ini, manajemen perusahaan diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* mereka dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka, bahkan ketika mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika mereka tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam kelangsungan hidup organisasi (Ulum, 2009: 4).

Ghozali dan Chariri (2007) mengungkapkan bahwa *stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan

pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Dalam perspektif teori *stakeholder*, masyarakat dan lingkungan merupakan *stakeholder* inti perusahaan yang harus diperhatikan (Lako, 2011: 5).

Teori *stakeholder* ini juga menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka melebihi permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau diakui oleh *stakeholder*. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dampak aktivitas-aktivitas mereka dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi *stakeholder* (Ulum, 2009: 5).

Dalam pengambilan keputusan, para *stakeholder* membutuhkan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan aktivitas yang telah dilakukan. Perusahaan akan berusaha untuk mengungkapkan informasi yang berintegritas, agar para *stakeholder* tetap menaruh kepercayaan terhadap perusahaan. Salah satu bentuk pengungkapan yaitu pengungkapan yang bersifat sukarela yang dibutuhkan oleh *stakeholder* baik yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi perusahaan. Laporan sukarela yang sedang berkembang saat ini adalah *sustainability report* (laporan keberlanjutan). Melalui pengungkapan *sustainability*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*report* (pengungkapan sosial dan lingkungan) perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007).

#### 2.1.4. *Legitimacy Theory*

*Legitimacy theory* menjelaskan bahwa organisasi secara kontinu akan beroperasi sesuai dengan batas-batas dan nilai yang diterima oleh masyarakat di sekitar perusahaan dalam usaha untuk mendapatkan legitimasi. Menurut teori ini suatu perusahaan beroperasi dengan ijin dari masyarakat, dimana ijin ini dapat ditarik jika masyarakat menilai bahwa perusahaan tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan kepadanya. Legitimasi sangat penting bagi perusahaan, mengingat keberadaan perusahaan berada di lingkungan sosial atau komunitas sosial yang harus berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan kelangsungan perusahaan sendiri (Adhipradana dan Daljono, 2014).

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya waktu.



Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan di mana mereka beroperasi (Ulum, 2009: 7).

Berdasarkan teori legitimasi, organisasi harus secara berkelanjutan menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial .hal ini seringkali dapat dicapai melalui pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan perusahaan. Organisasi dapat menggunakan *disclosure* untuk mendemonstrasikan perhatian manajemen akan nilai sosial, atau untuk mengarahkan kembali perhatian komunitas akan keberadaan pengaruh negatif aktivitas organisasi. Sejumlah studi terdahulu melakukan penilaian atas pengungkapan sukarela laporan tahunan dan memandang pelaporan informasi lingkungan dan sosial sebagai metode yang digunakan organisasi untuk merespon tekanan publik. Teori legitimasi menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam laporan keuangan (Ulum, 2009: 8).

## 2.2. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Seperti yang dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsep pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan (Mardikanto, 2014: 14).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang (Mardikanto, 2014: 17-18) :

- a) Menjamin pemerataan dan keadilan, yaitu generasi mendatang memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam sehingga berkelanjutan
- b) Menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, spesies, habitat, ekosistem agar tercipta keseimbangan lingkungan
- c) Menggunakan pendekatan integratif sehingga terjadi keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan untuk masa kini dan mendatang
- d) Menggunakan pandangan jangka panjang untuk merencanakan rancangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan
- e) Meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
- f) Memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang dan mengaitkan bahwa pembangunan ekonomi harus seimbang dengan konservasi lingkungan.

Tujuan dari *sustainable development* adalah menyeimbangkan antara dua kepentingan sekaligus yaitu pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dua tujuan ini saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri. *Sustainable development* tercapai ketika perusahaan telah berpijak dalam konsep *triple bottom line* (Adhipradana dan Daljono, 2014).

### 2.3. Konsep *Triple Bottom Line*

Dewasa ini perusahaan dituntut untuk lebih transparasi dan akuntabel dalam kegiatan yang berhubungan dengan *sustainable* perusahaan oleh berbagai pihak dari *stakeholder*. John Elkington (1997; dalam Effendi, 2009: 109) memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memerhatikan 3P (*profit, people and planet*). Selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti memerhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) Ketiga hal ini sering disebut sebagai *triple bottom line* (Adhipradana dan Daljono, 2014) yaitu:

#### 1. *Profit* (Keuntungan)

Setiap perusahaan pasti bertujuan untuk mendapatkan *profit*. Perusahaan dapat berkelanjutan jika mendapatkan *profit* secara terus-menerus. Dengan *profit* yang didapatkan perusahaan, perusahaan dapat tetap *going concern*. Namun kenyataannya, saat ini perusahaan tidak dapat *going concern* hanya dengan mengedepankan *profit* saja, namun juga *people* dan *planet* yang terlibat dalam proses dan dampak atas aktivitas perusahaan yang sering dilakukan oleh perusahaan (Adhipradana dan Daljono, 2014)

#### 2. *People* (Masyarakat)

Perusahaan memerlukan *people* baik investor, karyawan, *supplier*, konsumen, masyarakat, maupun lembaga masyarakat. Perusahaan memerlukan investor untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Untuk menarik para investor, perusahaan harus dapat memenuhi keinginan investor dan memberikan tingkat kepercayaan yang

tinggi agar para investor tertarik untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan. Karyawan sebagai pendukung proses produksi memerlukan perhatian perusahaan atas pengelolaan lingkungan kerja yang baik. Karyawan memerlukan perhatian atas gaji, pelatihan, pendidikan dan jaminan-jaminan. Mengelola hubungan yang baik dengan *supplier*, konsumen dan masyarakat sekitar dapat meningkatkan pencitraan baik bagi perusahaan. Dengan pencitraan baik, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan yang berlipat. Dengan perusahaan fokus terhadap lingkungan sekitar, berbagai lembaga masyarakat yang peduli terhadap lingkungan hidup akan mendukung kegiatan dan keberlangsungan perusahaan (Adhipradana dan Daljono, 2014).

### 3. *Planet* (Lingkungan)

Perusahaan juga harus memperhatikan *planet* (lingkungan) karena perusahaan dapat beroperasi dengan mengambil sumber daya alam yang ada di dalamnya. Perusahaan yang menggunakan sumber daya alam secara serampangan dapat menyebabkan menipisnya SDA yang ada. Rusaknya lingkungan tidak hanya disebabkan penggunaan SDA secara serampangan, tetapi juga karena tercemarnya lingkungan sebagai akibat dari kurangnya kemampuan perusahaan untuk mengolah limbah. Kerusakan lingkungan yang berimbas pada ketersediaan SDA sebagai bahan baku dapat menurunkan pendapatan perusahaan. Perusahaan harus dapat menggunakan SDA dengan efisien yang memastikan ketersediaan SDA bagi generasi selanjutnya dan mengolah limbah dengan efektif agar lingkungan sekitar tidak tercemar (Adhipradana dan Daljono, 2014).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

### 2.4.1. Definisi *Sustainability Report*

GRI (*Global Reporting Initiative*) mendefinisikan *Sustainability Report* sebagai praktik dalam mengukur dan mengungkapkan aktivitas perusahaan, sebagai tanggung jawab kepada *stakeholder* internal maupun eksternal mengenai kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (Adhipradana dan Daljono, 2014). Laporan tersebut menguraikan dampak organisasi perusahaan terhadap tiga aspek yakni dampak operasi perusahaan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuan dibuatnya laporan keberlanjutan ini adalah untuk menilai perusahaan apakah telah mampu mengatasi isu keberlanjutan, seperti penghematan dan konservasi energi.

*Sustainability Report* merupakan bukti bahwa adanya komitmen perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang dapat dinilai hasilnya oleh para pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Selain itu, *sustainability report* menjadi bukti salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh suatu organisasi baik pemerintah maupun perusahaan dalam berdialog dengan warga negara ataupun *stakeholder*-nya sebagai salah satu upaya penerapan pendidikan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan *sustainability report* pada saat sekarang ini menempati posisi yang sama pentingnya dengan pengungkapan informasi seperti yang diungkapkan dalam laporan keuangan (Nasir, dkk., 2014).

#### 2.4.2. Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengungkapan informasi sosial perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary disclosure*) adalah pengungkapan *sustainability report*. Dimana belum ada peraturan yang mewajibkan pengungkapan *sustainability report* di Indonesia. Hal ini jelas berbeda dengan Negara-negara Eropa, dimana praktik pengungkapan *sustainability report* telah diwajibkan untuk semua sektor perusahaan. Sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No 1 (revisi 1998) paragraf kesembilan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industry dimana faktor –faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industry yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna yang memegang peranan penting.”

Berdasarkan PSAK No. 1 (revisi 1998) tersebut, maka perusahaan diharapkan untuk dapat mengungkapkan segala informasi yang berkaitan dengan tindakan sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan yang dimaksud termuat dalam pasal 74 (1) yang berbunyi: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya” (Lako, 2011: 21).

*Sustainability report* dapat dinilai dari seberapa banyak indikator-indikator yang dapat diungkapkan dalam laporan tersebut. Semakin banyak indikator yang diungkapkan dalam *sustainability report* maka semakin bagus kualitas dari *sustainability report* tersebut. GRI telah menetapkan indikator-indikator dari

pelaporan *sustainability report*. Adapun indikator *sustainability report* menurut GRI adalah sebagai berikut (Adhipradana, 2013) :

1. Indikator kinerja ekonomi
  - a. Aspek kinerja ekonomi: EC1, EC2, EC3, EC4
  - b. Aspek kehadiran pasar: EC5, EC6, EC7
  - c. Aspek dampak tidak langsung: EC8 dan EC9
2. Indikator kinerja lingkungan
  - a. Aspek material: EN 1 dan EN2
  - b. Aspek energi: EN3, EN4, EN5, EN6, EN7
  - c. Aspek air: EN8, EN9, EN10, EN11, EN12, EN13, EN14 dan EN15
  - d. Aspek emisi, efluen dan limbah: EN16, EN17, EN18, EN19, EN20, EN21, EN22, EN23, EN24, EN25
  - e. Aspek produk dan jasa: EN26 dan EN27
  - f. Aspek kepatuhan: EN28
  - g. Aspek pengangkutan dan transportasi: EN29
  - h. Aspek menyeluruh: EN30
3. Indikator kinerja tenaga kerja
  - a. Aspek pekerjaan: LA1, LA2 dan LA3
  - b. Aspek tenaga kerja/hubungan manajemen: LA4 dan LA5
  - c. Aspek kesehatan dan keselamatan jabatan: LA6, LA7, LA8 dan LA9
  - d. Aspek pelatihan dan pendidikan: LA10, LA11 dan LA12
  - e. Aspek keberagaman dan kesempatan setara: LA13 dan LA14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Indikator kinerja hak asasi manusia
  - a. Aspek praktik investasi dan pengadaan: HR1, HR2 dan HR3
  - b. Aspek nondiskriminasi: HR4
  - c. Aspek kebebasan berserikat dan berunding bersama berkumpul: HR5
  - d. Aspek pekerja anak: HR6
  - e. Aspek kerja paksa dan kerja wajib: HR7
  - f. Aspek praktik/tindakan pengamanan: HR8
  - g. Aspek hak penduduk asli: HR9
5. Indikator kinerja masyarakat:
  - a. Aspek komunitas: SO1
  - b. Aspek korupsi: SO2, SO3 dan SO4
  - c. Aspek kebijakan publik: SO5 dan SO6
  - d. Aspek kelakuan tidak bersaing: SO7
  - e. Aspek kepatuhan: SO8
6. Indikator kinerja tanggung jawab produk
  - a. Aspek kesehatan dan keamanan pelanggan: PR1 dan PR2
  - b. Aspek pemasangan label bagi produk dan jasa: PR3, PR4 dan PR5
  - c. Aspek komunikasi pemasaran: PR6 dan PR7
  - d. Aspek keleluasaan pribadi pelanggan: PR8
  - e. Aspek kepatuhan: PR9



*stakeholdernya*, dimana secara tipikal berdasarkan *home marker* (pasar tempat beroperasinya) yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang.

Kepemilikan asing di Indonesia dibagi menjadi dua macam yaitu kepemilikan saham (*trade*) dan penambahan anak cabang (*ownership*). Menurut Susanto (1992), ada beberapa alasan mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan asing harus memberikan pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki kepemilikan asing sebagai berikut (Adhipradana dan Daljono, 2014):

- 1) Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri
- 2) Perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk.
- 3) Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum.

## 2.7. Ukuran Perusahaan

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi perusahaan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar, penjualan besar, karyawan yang banyak, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, dan struktur kepemilikan yang lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas. Perusahaan besar mempunyai biaya informasi yang rendah, kompleksitas dan dasar kepemilikan yang lebih luas

dibanding perusahaan kecil sehingga perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Ada empat argumen yang dapat menjelaskan mengapa perusahaan besar lebih mungkin untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dibandingkan perusahaan kecil. *Pertama*, perusahaan besar lebih dimungkinkan mempunyai biaya produksi informasi atau biaya kerugian persaingan yang lebih rendah daripada perusahaan yang lebih kecil. *Kedua*, perusahaan besar dimungkinkan mempunyai dasar pemilikan yang lebih luas, sehingga diperlukan lebih banyak pengungkapan karena tuntutan dari pemegang saham. *Ketiga*, perusahaan besar lebih mungkin untuk merekrut sumber daya manusia dengan kualifikasi yang tinggi yang diperlukan untuk menerapkan sistem pelaporan yang canggih. *Keempat*, manajer perusahaan yang lebih kecil tampaknya percaya bahwa semakin banyak informasi yang diungkapkan dapat membahayakan potensi kompetitif perusahaan (Ulum, 2009: 20).

## **2.8. Menurut Pandangan Islam Tentang Pelestarian Lingkungan dan Pengungkapan Sustainability Report**

*Sustainability Report* merupakan laporan yang memuat informasi kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang ingin tumbuh berkesinambungan haruslah memperhatikan 3P yaitu selain mengejar keuntungan (*Profit*), perusahaan harus terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*People*) dan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*) (Effendi, 2009: 109).

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Institut Islamiah Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah menimbang bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya; bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan; bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan; bahwa dalam praktiknya kegiatan pertambangan seringkali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif baik pada aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial dan budaya; bahwa terhadap masalah ini ada pertanyaan di masyarakat mengenai hukum pertambangan dalam Islam dan praktek pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan guna dijadikan pedoman.

Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41).*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia didorong untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dalam hal ini perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dituntut untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi sehingga selain untuk mencari keuntungan, perusahaan juga harus tetap memperhatikan sosial dan lingkungan.

Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* ” (QS. Al-Anfal:27)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita harus menjaga amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kita. Dalam hal ini perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah memegang amanat-amanat dari para *stakeholder*. Untuk menjaga amanat tersebut perusahaan dapat mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada para *stakeholder*-nya.

## 2.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan *sustainability report* telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1

## Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Publikasi	Variabel	Hasil penelitian
1	Jannah dan Kurnia (2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> Pada Perusahaan di BEI	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi	Profitabilitas (X1), Likuiditas (X2), <i>Leverage</i> (X3), Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Y)	Variabel profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
2	Andri dan Agung (2015)	Faktor Keuangan dan <i>Corporate Governance</i> Sebagai Penentu Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	<i>Accounting Analysis Journal</i>	Profitabilitas (X1), Ukuran perusahaan (X2), Kepemilikan institusional (X3), Dewan komisaris (X4), <i>Governance committee</i> (X5), Komite audit (X6), <i>Sustainability report</i> (Y)	Variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> . Variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris, <i>governance committee</i> , komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .
3	Adhi-pradana dan	Pengaruh Kinerja Keuangan,	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i>	Total asset (X1), Total karyawan	Variabel total asset, total karyawan,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

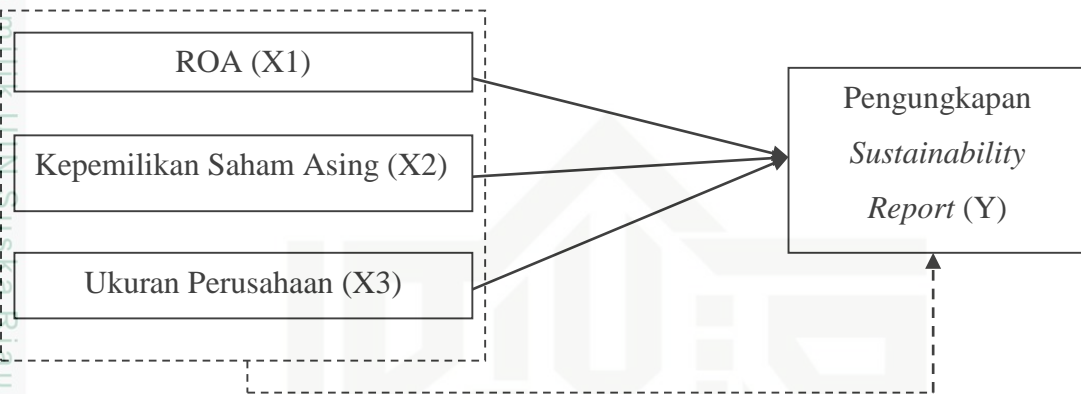
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Daljono (2014)	Ukuran Perusahaan dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Pengungkapan Sustainability Report		(X2), <i>Governance committee</i> (X3) Profitabilitas (X4), Likuiditas (X5), DPR (X6), Komite audit (X7), Dewan komisaris (X8), Kepemilikan manajemen (X9), Kepemilikan asing (X10), Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Y)	<i>governance committee</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>Sustainability Report</i> . Variabel profitabilitas, likuiditas, DPR, komite audit, dewan komisaris, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>Sustainability Report</i> .
4	Dilling (2010)	<i>Sustainability Reporting In a Global Context: What Are The Characteristics Of Corporations That Provide High Quality Sustainability Reports</i>	<i>International Business &amp; Economic Research Journal</i>	<i>Corporate Governance</i> (X1), Ukuran perusahaan (X2) Kinerja Keuangan (X3), Lokasi (X4), G3 <i>Sustainability Report</i> (Y)	Perusahaan-perusahaan dengan karakteristik profitabilitas yang tinggi, bergerak di sektor pertambangan dan memiliki pertumbuhan jangka panjang yang kuat cenderung pembuatan SR yang berkualitas.

## 2.10. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Keterangan : —————> Hubungan secara parsial  
 - - - - -> Hubungan secara simultan

## 2.11. Pengembangan Hipotesis

### 2.11.1. ROA (*Return On Asset*) dan Pengungkapan *Sustainability Report*

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya (Ulum, 2009: 7).

Menurut Pattern (1992) dalam (Hadi, 2011: 92), salah satu upaya yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengelola legitimasi agar efektif yaitu dengan cara melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terutama yang terkait masalah tanggung jawab sosial. Untuk mendapatkan legitimasi, perusahaan publik diwajibkan untuk tidak melupakan masyarakat dalam distribusi hasil (laba) perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya berfokus untuk keuntungan, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan sosial (Wasito, 2016).

Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi memiliki kinerja keuangan yang kuat sehingga memiliki kemampuan lebih untuk melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan beserta pengungkapannya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi berupaya untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* dalam rangka menjalin hubungan baik dengan seluruh *stakeholder* (Aniktia dan Khafid, 2015). Hal ini sesuai dengan *stakeholder theory* dimana manajemen perusahaan akan berusaha memenuhi atau mengelola harapan para *stakeholder* (Ulum, 2009: 4). Penelitian Dilling (2010) menemukan bahwa *profit margin* (ROA) berhubungan positif dengan pengungkapan *sustainability report* berdasarkan G3. Selain itu penelitian oleh Nasir (2014) juga berhasil membuktikan pengaruh ROA terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan keterangan di atas dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Diduga *Return On Asset* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.11.2. Kepemilikan Asing dan Pengungkapan *Sustainability Report*

Kepemilikan asing (*foreign ownership*) adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap sangat peduli terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Hery, 2012: 137). Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak asing cenderung akan lebih luas melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial (Adipradana dan Daljono, 2014).

Eropa dan AS merupakan negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air. Hal ini juga yang menjadikan dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan multinasional mulai mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan (Hery, 2012: 137). Untuk menjaga legitimasi, perusahaan mengungkapkan laporan tanggung jawab sosial berupa *sustainability report* sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap para *stakeholder* (Adipradana dan Daljono, 2014).

Menurut Susanto (1992), ada beberapa alasan mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan asing harus memberikan pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki kepemilikan saham asing sebagai berikut (Pian, 2010):

- a) Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri

- b) Perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk
- c) Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2016) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan asumsi bahwa negara-negara asing memiliki kecenderungan untuk lebih perhatian pada pelaporan kegiatan sosial berupa *sustainability report*, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

**H2: Diduga kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.**

### 2.11.3. Ukuran perusahaan dan Pengungkapan *Sustainability Report*

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi perusahaan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar, penjualan besar, karyawan yang banyak, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, dan struktur kepemilikan yang lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas. Perusahaan besar mempunyai biaya informasi yang rendah, kompleksitas dan dasar kepemilikan yang lebih luas dibanding perusahaan kecil sehingga perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas (Suryono dan Prastiwi, 2011).

Ada empat argumen yang dapat menjelaskan mengapa perusahaan besar lebih mungkin untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dibandingkan perusahaan kecil yaitu (Ulum, 2009: 20):

- a) Perusahaan besar lebih dimungkinkan mempunyai biaya produksi informasi atau biaya kerugian persaingan yang lebih rendah daripada perusahaan yang lebih kecil
- b) Perusahaan besar dimungkinkan mempunyai dasar pemilikan yang lebih luas, sehingga diperlukan lebih banyak pengungkapan karena tuntutan dari pemegang saham
- c) Perusahaan besar lebih mungkin untuk merekrut sumber daya manusia dengan kualifikasi yang tinggi yang diperlukan untuk menerapkan sistem pelaporan yang canggih
- d) Manajer perusahaan yang lebih kecil tampaknya percaya bahwa semakin banyak informasi yang diungkapkan dapat membahayakan potensi kompetitif perusahaan.

Ada beberapa penjelasan yang menunjukkan bahwa besaran perusahaan dapat berpengaruh terhadap luas pengungkapan. *Pertama*, teori agensi menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan mungkin akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk mengurangi biaya keagenan. *Kedua*, perusahaan besar menghadapi biaya politis yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh pasar maupun publik secara umum. Mengungkapkan lebih



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan akuntabilitas publik (Agustina, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Adhipradana dan Daljono (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan argumen-argumen di atas dapat diasumsikan bahwa:

**H3: Diduga ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*.**

#### **2.11.4. Return On Asset, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report**

*Return On Asset* merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dimiliki. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang tinggi memiliki kinerja keuangan yang kuat sehingga memiliki kemampuan lebih untuk melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan beserta pengungkapannya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi berupaya untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* dalam rangka menjalin hubungan baik dengan seluruh *stakeholder* (Aniktia dan Khafid, 2015).

Kepemilikan asing (*foreign ownership*) adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap sangat peduli terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Hery, 2012: 137). Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak asing cenderung akan lebih luas melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial (Adipradana dan Daljono, 2014).

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi perusahaan. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Perusahaan besar mempunyai biaya informasi yang rendah, kompleksitas dan dasar kepemilikan yang lebih luas dibanding perusahaan kecil sehingga perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas (Suryono dan Prastiwi, 2011). Berdasarkan argumen-argumen diatas dapat diasumsikan bahwa:

**H4: Diduga *return on asset*, kepemilikan saham asing dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability report*.**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.